



PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN

Setelah melakukan talaahan dan evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan pendidikan lima tahun terakhir, sebagaimana digambarkan pada bab sebelumnya (BAB 2), masih ada permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian yang serius dalam kurun waktu lima tahun mendatang, antara lain adalah:

1. Belum meratanya fasilitas dan akses Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) di seluruh desa baik negeri maupun swasta.
2. Masih terbatasnya akses pendidikan di daerah-daerah terpencil khususnya tingkat SMP.
3. Belum semua sekolah memenuhi Standar Nasional Pendidikan untuk mendorong percepatan pencapaian Akreditasi A.
4. Belum terpenuhinya kapasitas daya tampung sekolah di beberapa sekolah di kecamatan.
5. Belum meratanya penyebaran sekolah dan penyebaran penduduk;
6. Masih terdapat anak putus sekolah karena alasan pendanaan dan non pendanaan.
7. Perlu adanya peningkatan kontribusi dan peran pendidikan nonformal dalam menunjang sukses program wajar Pendidikan Dasar dan Menengah untuk anak putus sekolah serta pemberantasan buta aksara di Kabupaten Kutai Timur.
8. Masih terdapat kesenjangan dalam fasilitas sarana penunjang pembelajaran Pendidikan yang bermutu belum merata pada seluruh sekolah, seperti perpustakaan dan laboratorium serta media pembelajaran;
9. Masih kurangnya kompetensi SDM tenaga pendidik dan kependidikan yang sesuai dengan kebutuhan.
10. Perlu ditingkatkan kualifikasi pendidik sesuai standar pelayanan minimal (SPM) dalam rangka memenuhi standar nasional pendidikan pada semua jenjang.
11. Penyebaran tenaga pendidik dan kependidikan kurang merata serta perlunya peningkatan insentif guru dan tenaga kependidikan.

12. Belum optimumnya kegiatan kelompok kerja kepala sekolah, kelompok kerja guru/MGMP dan Supervisi Kinerja guru;
13. Masih Kurangnya kreatifitas pendidik dalam membuat Inovasi pembelajaran dalam perencanaan kurikulum sesuai dengan era digital sekarang ini.
14. Masih Kurangnya pemberian *Reward* atau penghargaan kepada Pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestasi untuk memacu kreativitas dalam membuat inovasi di bidang Pendidikan.
15. Internet sebagai sumber belajar belum optimal diberdayakan dengan baik;
16. Kemampuan manajerial sekolah dalam mengembangkan pelayanan Pendidikan belum merata pada seluruh sekolah;
17. Masih belum optimalnya pendampingan dari pengawas sekolah terkait peningkatan dan pemenuhan akreditasi sekolah.
18. Masih belum optimal penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diatur Peraturan Kemendikbud Nomor 32 Tahun 2018, khususnya pemberian bantuan beasiswa dan pemenuhan kebutuhan dasar untuk siswa miskin dan tidak mampu.
19. Belum optimalnya pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOSDA) untuk negeri dan swasta.
20. Perlu adanya kontribusi dan peran UKS Kutai Timur terhadap peningkatan layanan Kesehatan di sekolah.
21. Perlu adanya penunjang, sarana dan prasarana dalam mengembangkan minat, bakat dan kreativitas siswa.
22. Belum tersedianya modul/Buku pembelajaran Kurikulum Muatan Lokal Produk Daerah Kabupaten Kutai Timur
23. Perlu adanya pengembangan kebijakan untuk memperkuat dan memperluas pemanfaatan TIK di bidang Pendidikan.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Setiap periode kepemimpinan kepala daerah harus merumuskan visi pembangunan daerah yang bersangkutan, demikian juga dengan Kabupaten Kutai Timur. Rumusan visi menggambarkan kondisi yang ingin dicapai pada masa akhir jabatan Kepala Daerah. Adapun visi pembangunan Kabupaten Kutai Timur periode 2016-2021 adalah:

Visi Kabupaten Kutai Timur 2021-2026

“*Menata Kutai Timur Sejahtera Untuk Semua*”



Penjabaran Visi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk mewujudkan visinya terdapat Misi yaitu :



Gambar 3.2

Misi Kabupaten Kutai Timur 2021-2026

Dalam upaya untuk menyamakan persepsi agar misi tersebut dapat dicapai, maka perlu penjelasan dari masing-masing misi di atas, yang diuraikan sebagai berikut :

Misi 1 : Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya dan bersatu

Pembangunan yang diarahkan pada peningkatan taraf hidup masyarakat yang sejahtera dengan mempertimbangkan budaya lokal serta lebih meningkatkan Ketakwaan Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

Kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan iman, takwa dan berakhlak mulia merupakan perwujudan dalam beragama yang menjadi salah satu tolak ukur menuju keberhasilan pembangunan Kabupaten Kutai Timur. Keimanan dan ketakwaan adalah landasan moral dan etika

yang tidak hanya memiliki muatan spiritual, tetapi juga muatan sosial, sehingga pada prakteknya tidak saja ditunjukkan dengan ketaatan ritual individu, tetapi juga harus diaplikasikan dalam kehidupan sosial, sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat untuk merajut kehidupan bersama.

Pembangunan yang berorientasi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, tidak akan lepas dari corak dan tata nilai kedaerahan yang tercermin pada keberaddan seni budaya. Budaya lokal merupakan salah satu sumber nilai yang menunjukkan jati diri, identitas dan kepribadian suatu komunitas masyarakat. Hal ini menjadi benteng pertahanan yang sangat efektif untuk menghadapi dampak negatif dari derasnya arus perubahan. Pada sisi lain, budaya ini juga merupakan modal utama pembangunan untuk mewujudkan keserasian dan keselarasan hidup manusia.

Peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat yang sejahtera dengan mengembangkan program pengentasan kemiskinan dan juga program penurunan angka pengangguran. Upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan mengembangkan program pengentasan kemiskinan dan program penurunan angka pengangguran. Program ini dapat dilakukan dengan peningkatan ketrampilan angkatan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Pembangunan yang diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat juga diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kualitas kesehatan. Peningkatan kualitas pendidikan dapat dilakukan dengan peningkatan fungsi sarana dan prasarana sekolah, peningkatan kualitas tenaga pendidik serta peningkatan kualitas pendidikan. Sedangkan untuk peningkatan kualitas kesehatan juga dilakukan dengan pembangunan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas tenaga kesehatan serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

Misi 2 : Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat Berbasis Sektor Pertanian

Pembangunan yang diarahkan untuk mewujudkan kemandirian pengelolaan dan pengadaan pangan daerah yang tertumpu pada produksi. Upaya ini pada dasarnya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya lokal.

Salah satu upaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat dilakukan dengan peningkatan produksi pertanian/ perkebunan/ perikanan, dan juga perlu adanya optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi. Selain itu juga diperlukan peningkatan pengembangan ketrampilan petani, dan peningkatan pengembangan Sumber Daya Manusia dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing adalah Peningkatan peran kelembagaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada sektor pertanian serta peningkatan peran koperasi dalam pengelolaan komoditas unggulan daerah dan UMKM.

Misi 3 : Mewujudkan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata

Pembangunan yang diarahkan untuk lebih meningkatkan kapasitas infrastruktur dasar dan meningkatkan kualitas pelayanannya. Ketersediaan infrastruktur akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dalam hal pemerataan ekonomi daerah (daya beli masyarakat), tingkat pendidikan, kesehatan dan daya saing daerah terutama pada keberlangsungan pergerakan barang dan jasa beserta akses antar wilayah. Selain itu, ketersediaan infrastruktur menjadi katalisator pencapaian pembangunan pada bidang lainnya.

Pembangunan Infrastruktur harus memperhatikan kapasitas sumber daya yang ada beserta aspek daya dukung lingkungan hidup. Optimalisasi potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya fisik serta memperkecil dampak keterpurukan lingkungan dan juga memperhatikan keterpaduan dengan tata ruang wilayah, hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi dampak negatif yang terjadi akibat pembangunan. Sehingga dalam pembangunan infrastruktur diperlukan perubahan pola berfikir dan bertindak dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan, yaitu dengan mengacu pada pembangunan berwawasan lingkungan.

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat dengan meningkatkan konektivitas antar wilayah, meningkatkan infrastruktur fasilitas perumahan/ pemukiman, serta meningkatkan sarana dan infrastruktur pendukung ekonomi dan juga meningkatkan infrastruktur teknologi dan informasi.

Misi 4 : Mewujudkan Pemerintahan Yang Partisipatif Berbasis Penegakan Hukum Dan Teknologi Informasi

Penyelenggaraan pemerintah yang diarahkan pada pelaksanaan otonomi daerah secara efektif, efisien dan akuntabel dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*), sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang disertai dengan penegakan hukum. Perwujudan pelayanan publik mencakup beberapa aspek, yaitu sumber daya aparatur, regulasi dan kebijakan serta standar pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Untuk menjamin keberlangsungan pemerintahan yaitu dengan lebih meningkatkan profesionalisme birokrasi yang salah satu upaya dalam mewujudkan Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur yang bersih. Hal ini memerlukan proses dan komitmen dan seluruh pemangku kepentingan.

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme birokrasi menuju masyarakat Kabupaten Kutai Timur yang maju, mandiri dan berdaya saing, diperlukan suatu upaya yang antara lain: peningkatan kapasitas SDM aparatur sesuai peran dan fungsinya, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, dengan peningkatan pelayanan publik, serta peningkatan pemanfaatan teknologi dengan menata kualitas layanan publik yang berbasis interoperabilitas.

Misi 5 : Mewujudkan Sinergitas Pengembangan Wilayah dan Integrasi Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan

Pembangunan yang diarahkan pada peningkatan pemanfaatan tata ruang dan pembangunan infrastruktur wilayah secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Pemantapan tata ruang wilayah merupakan unsur penunjang utama dalam mendukung terciptanya pembangunan Kabupaten Kutai Timur. Keberadaan kebijakan tata ruang wilayah yang mantap akan mempengaruhi sektor pembangunan yang lain terutama pembangunan infrastruktur dan pengembangan perekonomian khususnya sektor pertanian.

Upaya yang dapat dilakukan untuk pengembangan wilayah yang berwawasan lingkungan dengan cara peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup, serta peningkatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.

3.3 TELAAHAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan Nasional

Dalam rangka mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dan sejalan dengan visi Pendidikan nasional, Kemdikbud mempunyai visi 2025 untuk menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kami/Insan Paripurna).

Sebagai kemeterian yang mengemban amanat mengendalikan pembangunan SDM melalui ikhtiar Bersama semua anak bangsa untuk meningkatkan mutu Pendidikan dan memajukan kebudayaan, kemendikbud dalam menentukan visi kementerian berdasarkan pada capaian kinerja, potensi dan permasalahan, Visi Presidean pada RPJMN tahun 2020-2024, serta visi Indonesia 2045. Adapun Visi Kemendikbud 2020-2024 adalah:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan

Sejalan dengan perwujudan visi dan misi tersebut, kemdikbud sesuai dengan tugas dan kewenangannya, juga berkomitmen untuk menciptakan Pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama beriman, bertakwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.

Misi Kementerian Pendidikan dan kebudayaan untuk mendukung pencapaian visi Presiden, Kemendikbud sesuai tugas dan kewenangannya, melaksanakan Misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita kedua, yaitu menjabarkan misi 1 Peningkatan kualitas manusia Indonesia; misi 5 kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; dan misi 8 pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Untuk itu, misi kemendikbud dalam melaksanakan Nawacita Kedua tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan Bahasa dan sastra
3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan Pendidikan dan Kebudayaan.

3.3.2 Telaahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur

Sejalan dengan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945, tujuan dan fungsi Pendidikan nasional sebagaimana tertuang dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ditetapkanlah visi Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 sebagai berikut:

“Berani Untuk Kaltim Berdaulat”

Visi tersebut menjelaskan bahwa:

1. Berani

Pemerintah mempunyai keberanian, tekad dan komitmen yang kuat untuk memaksimal kewenangan yang dimiliki sesuai peraturan perundang-undangan untuk mensejahterakan masyarakat.

2. Berdaulat

- a. Kalimantan Timur memiliki **kemantapan** dalam pemerintahan, hukum dan pelayanan publik
- b. Kalimantan Timur mampu mewujudkan **kemandirian** dan dalam ekonomi kerakyatan dan ketercukupan kebutuhan dasar
- c. Kalimantan Timur mampu mewujudkan **kemandirian** dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
- d. Kalimantan Timur mampu melahirkan sumber daya manusia berkarakter, berkualitas dan memiliki **daya saing**.

Telaahan terhadap Pendidikan tertuang pada Misi 1 yaitu berdaulat dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berakhlak mulia

dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas. Misi ini mempunyai tujuan mewujudkan SDM yang berdaya saing, berkarakter dan berakhlak mulia. Strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur adalah peningkatan mutu dan akses Pendidikan melalui:

1. Peningkatan kualitas layanan Pendidikan vokasi/kejuruan selaras kebutuhan pasar kerja
2. Mendorong pengembangan SMA/SMK Negeri terpadu (Boarding School)
3. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, serta kemampuan pembelajaran berbasis IT
4. Pemberian bantuan biaya Pendidikan bagi masyarakat tidak mampu
5. Peningkatan sarana Pendidikan dalam mendukung pembelajaran jarak jauh
6. Pengembangan Perpustakaan berbasis IT

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Integrasi RTRW dengan kebijakan pembangunan dalam RPJPD dan RPJMD menjadi amanat Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dalam Undang-undang penataan ruang diamanatkan bahwa penyusunan RTRW mengacu pada RPJPD, dan sekaligus RTRW juga menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD dan RPJPD. Integrasi ini harus sejalan dan terintegrasi, agar dapat dijadikan acuan seluruh sector dalam melaksanakan pembangunan.

Dokumen rencana tata ruang wilayah (RTRW) pada hakekatnya merupakan suatu paket kebijakan umum pengembangan daerah. Rencana tata ruang merupakan hasil perencanaan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang. Kebijakan yang dirumuskan pada dokumen ini merupakan dasar strategi pembangunan spasial, baik yang berkenaan dengan perencanaan tata ruang yang lebih terperinci (RDTRK, RTBL), maupun rencana kegiatan sektoral seperti kawasan perdagangan, industri, pemukiman, serta fasilitas umum dan sosial. Dalam implementasinya, pemanfaatan ruang dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal, sehingga apabila terjadi suatu penyimpangan atau pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW, sehingga dalam menyusun suatu perencanaan perlu

mengacu pada perencanaan ruang baik secara konseptual maupun operasional atau aktualisasi di lapangan.

Rencana Tata Ruang memberikan arahan pembangunan yang bersifat spasial dan berimplikasi pada keruangan, sedangkan RPJPD dan RPJMD memberikan payung konseptual bagi pembangunan secara spasial. Dalam RTRW terdapat arahan lokasi pemanfaatan ruang yang menjadi acuan dalam implementasi pembangunan daerah.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Timur dan setelah menelaah beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian yang serius dalam kurun waktu lima tahun mendatang, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur menentukan beberapa isu-isu strategis yang harus dilaksanakan untuk meningkatkan pencapaian kinerja pembangunan Pendidikan selama lima tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Sesuai dengan sasaran RPJMD (M1, T1, S2) meningkatnya taraf Pendidikan masyarakat, dengan indikator Meningkatnya Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) isu strategis Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut:
 - Meningkatkan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) salah satunya melalui sosialisasi pemahaman kepada masyarakat Kabupaten Kutai Timur bahwa pendidikan merupakan salah satu Indikator penting dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Upaya Dinas Pendidikan dalam mensosialisasikan hal ini yaitu membuat Web Dinas Pendidikan yang terbuka untuk umum dan akan memberikan informasi-informasi penting seputar dunia Pendidikan.
 - Meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi sekolah (APS), salah satunya sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang juga di atur pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan minimal Pendidikan maka pemerintah daerah harus memenuhi pelayanan dasar berupa pembebasan biaya Pendidikan dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu dan

memberikan bantuan pemenuhan barang dan/jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh warga negara secara minimal berupa bantuan seragam, buku sekolah, dan alat tulis sebagai upaya percepatan wajib belajar 9 tahun bagi anak dari masyarakat tidak mampu.

- Mengurangi Angka Putus Sekolah (APtS) di Kabupaten Kutai Timur khususnya jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), maka Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur berupaya membuat program Beasiswa Kutim Tuntas yang diprioritaskan untuk Siswa miskin atau tidak mampu dan siswa berprestasi.
- Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD karena Program pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan indikator penting meningkatkan kesiapan anak untuk mengikuti Pendidikan di sekolah dasar dan jenjang selanjutnya mulai dari pemenuhan sarana, prasarana fasilitas Pendidikan maupun profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikannya.
- Meningkatkan inovasi sekolah dalam perencanaan kurikulum serta manajerial pengembangan pelayanan Pendidikan, maka perlu dilakukan pendampingan oleh Dinas Pendidikan dan pengawas sekolah melalui sosialisasi dan bimbingan teknis terkait tata Kelola Pendidikan dan pembuatan media pembelajaran digital yang sesuai dengan peraturan dan kurikulum yang berlaku.
- Meningkatkan Bantuan Operasional Sekolah (BOSDA) dan BOP Daerah untuk sekolah Negeri dan Swasta yang digunakan untuk memenuhi berbagai kegiatan sekolah dalam mengembangkan program-program dan meningkatkan layanan sekolah.
- Meningkatkan SKB, PKBM dan Lembaga Kursus Berakreditasi sebagai Langkah untuk peningkatan kualitas Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.
- Meningkatkan penunjang, sarana dan prasarana dalam mengembangkan minat, bakat dan kreativitas siswa.

2. Sesuai dengan sasaran RPJMD (M1, T1, S2) meningkatnya taraf Pendidikan masyarakat, dengan indikator Meningkatnya guru yang

memenuhi kualifikasi D-IV /S1, isu strategis Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan Kualitas dan profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kabupaten Kutai Timur, salah satunya meningkatkan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan minimal D4/S1,
- Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) guna mempersiapkan lulusan S1 Pendidikan dan DIV Non Pendidikan yang memiliki minat dan bakat menjadi guru untuk menguasai kompetensi guru seutuhnya yang berstandar nasional.
- Meningkatkan insentif guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan peraturan yang berlaku.
- Memberi bantuan seragam bagi guru negeri dan swasta sebagai langkah pemerataan Pendidikan mulai dari perkotaan hingga daerah 3 T di Kabupaten Kutai Timur.
- Memberi *Reward* atau penghargaan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berprestasi.
- Melakukan Perhitungan, pemetaan dan penataan tenaga pendidik dan kependidikan sesuai dengan kebutuhan dan linieritas Pendidikan.
- Mengoptimalkan kegiatan kelompok kerja kepala sekolah, kelompok kerja guru/MGMP dan Supervisi Kinerja guru sebagai perpanjangan tangan Dinas Pendidikan
- Meningkatkan kreatifitas pendidik dalam membuat Inovasi pembelajaran kurikulum sesuai dengan era digital sekarang ini.
- Mempersipkan Sekolah dan Pendidik dalam Program Sekolah penggerak yang merupakan visi Pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila.

3. Sesuai dengan sasaran RPJMD (M1, T1, S4) terwujudnya SDM yang beriman berakhlak mulia, dan berbudaya, dengan indikator Presentase Sekolah yang menerapkan Pembelajaran Kurikulum Muatan Lokal, isu strategis Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut:

- Melakukan Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar
- Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar

- Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar
 - Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal
4. Sesuai dengan sasaran RPJMD (M3, T1, S4) Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendidikan, dengan indikator Rasio ketersediaan Sekolah per penduduk usia sekolah SD dan SMP, isu strategis Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut:
- Meningkatkan Pembangunan dan rehabilitasi fasilitas dan Akses pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang sesuai dengan Analisa kebutuhan, proyeksi peningkatan penduduk, serta instrument akreditasi sekolah. Untuk menunjang ketercapaian target Pemerintah Daerah bidang Pendidikan.
 - Pemenuhan Sarana penunjang pembelajaran yang sesuai dengan standar Pendidikan.
 - Meningkatkan kontribusi dan peran UKS Kutai Timur terhadap peningkatan layanan Kesehatan di sekolah.
5. Sesuai dengan sasaran RPJMD (M4, T1, S1) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, dengan indikator Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Dinas Pendidikan, isu strategis Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut:
- Meningkatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian
 - Meningkatkan Pelayanan Administrasi Keuangan
 - Meningkatkan Pencatatan Barang Milik Daerah SKPD
 - Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah.
 - Mengembangkan Kebijakan untuk memperkuat dan memperluas pemanfaatan TIK di Bidang Pendidikan.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS VISI PENDIDIKAN INDONESIA

Kemdikbudristek telah menetapkan Visi Pendidikan Indonesia sebagai panduan dalam merumuskan kerja pendidikan sebagai berikut:

“Mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global.

Rapor pendidikan dan perencanaan berbasis data adalah alat bantu bagi satuan pendidikan dan dinas pendidikan untuk terus bersama memperbaiki kualitas layanan pendidikan. Dasar hokum perencanaan berbasis data diatur dalam PP No.57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Permendikbudristek No.09 tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Indikator Kinerja Urusan Pendidikan untuk Kabupaten/Kota sebagai Standar Pelayanan Minimal yang harus diprioritaskan adalah sebagai berikut:

No.	Kelompok Indikator	Indikator Kinerja Urusan Kab/Kota
1	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	1. Jumlah anak usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS) 2. Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)
2	Kualitas Hasil Belajar	3. Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan asesmen nasional 4. Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional 5. Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional 6. Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional
3	PAUD	7. Jumlah Satuan Paud yang mendapatkan min. akreditasi B 8. Tingkat pertumbuhan pendidik PAUD S1 dan D-IV 9. Rasio pengawas dan penilik PAUD



Kepala Dinas,
Mulyono, S. STP., M. Si
Pembina Utama Muda /IV.c
NIP. 19770202 199703 1 004

